

BAB II

KONDISI GEOGRAFIS KOTA BONTANG DAN KONDISI SOSIAL KOTA BONTANG

Pada bab ini akan dipaparkan objek penelitian. Dalam bab ini setidaknya terdapat 3 sub bab, yakni : (1) Gambaran Umum Kota Bontang; (2) Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Kota Bontang; (3) Budaya Politik Kota Bontang

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Bontang terletak antara 117 23' BT - 117 38' BT dan 0 01' LU - 0 12' LU atau berada pada belahan bumi bagian utara khatulistiwa. Kota Bontang memiliki luas wilayah 497.57 km² yang terdiri atas daratan 147.80 km² (29.70%) dan lautan 349.77 km² (70.30%). Secara geografis Kota Bontang di sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang pemekaran provinsi dan kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat, pada tanggal 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Kecamatan Bontang Selatan memiliki wilayah daratan paling luas (104,40 km²), disusul Kecamatan Bontang Utara (26,20 km²) dan Kecamatan Bontang Barat (17,20 km²).

Kota Bontang mempunyai aksesibilitas darat dan laut yang baik. Aksesibilitas darat sangat baik karena terletak di jalur Trans Kalimantan, serta terletak di Selat Makassar dengan pantai yang berbentuk teluk yang merupakan Alur Laut Kepulauan

Selatan terdiri 107.98 jiwa, Bontang Utara Terdiri atas 110.03 jiwa, Bontang Barat terdiri atas 110.98 jiwa, dan Kota Bontang sendiri terdiri 109.42 jiwa. Pertumbuhan Kota Bontang didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini bahwa pertumbuhan yang terjadi bukan karena pertumbuhan penduduk alami tetapi akibat migrasi. Dari rasio jenis kelamin per-kecamatan dengan tingkat terbanyak pada Bontang Barat dengan jumlah 110.98 jiwa.

Rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 didominasi oleh migrasi penduduk usia produktif dan angka kelahiran yang tinggi pada usia bayi sampai umur 4 tahun. Pertumbuhan tersebut diduga terkait dengan kondisi Kota Bontang yang merupakan daerah industri yang cenderung dibanjiri oleh penduduk pencari kerja. Kehadiran pendatang dari berbagai penjuru tanah air ke Kota Bontang menjadikan penduduk menjadi heterogen baik dari segi suku maupun agama. Perbedaan suku dan agama tersebut menyebabkan Kota Bontang kaya akan adat istiadat dan kebudayaan daerah.

2.2 Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Kota Bontang

Peningkatan pertumbuhan pun secara positif ditunjukkan oleh hampir seluruh sektor perekonomian Kota Bontang, hanya saja tidak pada sektor industri pengolahan. Sektor transportasi dan pergudangan serta sektor jasa pendidikan merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan paling cepat diantara seluruh sektor ekonomi Kota Bontang. Komoditas industri produksi Kota Bontang yang mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif pada pasar yang lebih besar berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor informasi dan komunikasi.

Peningkatan pertumbuhan pada tahun 2019 meningkat menjadi 80.09 dibandingkan dengan tahun 2018 terdiri 79.86. pembangunan sector Kota Bontang meningkat dengan adanya sector industry yang menjadikan pembangunan meningkat setiap tahunnya. Terkait dengan sektor lainnya di wilayah Bontang, Pemkot beserta seluruh jajarannya agar terus menjaga kondusivitas daerah agar iklim investasi di Bontang

yang dikenal sebagai kota industri dapat terjaga dengan baik. Selain itu, Pemkot Bontang perlu meningkatkan pembangunan pada sejumlah sektor. Pemprov telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan di Bontang, seperti sektor kelautan dan perikanan yang sangat potensial, namun belum tergarap secara optimal. Laju pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi (3,24 persen), lalu angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi.

Pemkot juga terus berusaha untuk meningkatkan manajemen dan pelayanan pendidikan, peningkatan manajemen dan pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga kerja serta pengembangan kewirausahaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan daya dukung lingkungan.

2.2.1 Pendidikan

Salah satu cara mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah pendidikan formal mulai dari jenjang SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Pada tahun 2015 ada penambahan 1 unit SD dan 3 unit SLTA. Jumlah gedung sekolah SD, SLTP dan SLTA baik yang negeri maupun swasta berturut-turut banyaknya adalah 60, 37 dan 25 unit. Angka partisipasi sekolah tahun 2015-2018 dengan rasio umur 13-15 terdiri 99.55 sedangkan rasio umur 16-18 terdiri 99.36 angka partisipasi sekolah di Kota Bontang. Pada jenjang pendidikan angka partisipasi kasar tahun 2015-2018 terdiri atas SD 112.88, SMP 79.97, sedangkan SMA 75.37. persentase penduduk buta huruf tahun 2015-2018 laki-laki 0.26 dan perempuan 0.21, jika digabung persentase penduduk yang buta huruf laki-laki dan perempuan terdiri 0.23 jiwa. Angka melek huruf tahun 2015-2018 laki-laki terdiri 99.74 sedangkan perempuan terdiri 99.79, jika digabungkan laki-laki dan perempuan dengan jumlah 99.77 persen jiwa. Perbandingan atau rasio antara guru dan murid akan menggambarkan rata-rata jumlah guru yang mengajar di sebuah sekolah. Rasio ini menggambarkan ketersediaan guru sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar pada sebuah sekolah. Ini penting diketahui karena ada relevansinya dengan terlaksananya proses belajar mengajar yang baik sehingga pada akhirnya mampu menciptakan bibit-bibit Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

2.2.2 Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan terutama puskesmas dan puskesmas pembantu karena kedua jenis fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Jumlah fasilitas penunjang kesehatan yang ada di Kota Bontang pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan jumlah praktek dokter dibanding tahun sebelumnya.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. Diharapkan dengan penyuluhan ini penularan penyakit sebagai akibat dari sanitasi lingkungan yang buruk dan kebiasaan hidup yang tidak sehat, seperti dipteria, muntaber, kolera, dan demam berdarah, dapat dicegah. Memasuki milenium baru, telah dicanangkan paradigma baru dalam pembangunan kesehatan, yaitu "Paradigma Sehat". Paradigma sehat merupakan model pembangunan kesehatan yang dalam jangka panjang akan mampu mendorong masyarakat dan kotanya untuk bersikap mandiri dalam menjaga kesehatan dirinya sendiri yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata melalui kesadaran tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bontang mencanangkan kebijakan untuk merevitalisasi peran puskesmas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Mulai tahun 2012 telah dibuka puskesmas 24 jam yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan upaya Pemerintah Kota untuk melakukan peningkatan akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat merupakan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang sehat. Sejalan dengan itu Pemerintah Kota Bontang menerbitkan Jamkesos dan Jamkesda.

2.2.3 Karakteristik Masyarakat Bontang

Wilayah Kota Bontang sekitar 34.977 Ha atau 70,29% merupakan wilayah perairan laut, sehingga karakteristik masyarakat Kota Bontang sangat dipengaruhi oleh ekosistem laut. Interaksi masyarakat Kota Bontang dengan pesisir laut memiliki intensitas yang berbeda-beda. Indikator dari besarnya interaksi ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang tinggal di pesisir laut atau di atas air, jumlah penduduk nelayan dan besar produksi perikanan. Beberapa wilayah permukiman yang memiliki interaksi besar dengan pesisir laut yaitu Bontang Kuala, Tanjung Laut Indah, Berbas Pantai, Berbas Tengah dan Loktuan.

Sebagai permukiman nelayan tertua, Bontang Kuala memiliki interaksi terbesar dengan pesisir laut. Aktifitas yang berkembang di desa ini meliputi perikanan dan wisata laut. Adanya pengembangan wisata pantai ini membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk dengan mendirikan usaha-usaha di bidang makanan dengan lokasi tempat di atas air. Dalam rangka pengembangan wisata di Bontang Kuala, dilaksanakan upacara adat secara rutin dan berhubungan dengan laut yaitu Pesta Laut. Tanjung Laut Indah juga terkenal memiliki interaksi yang tinggi terhadap pesisir. Aktifitas pesisir yang berkembang meliputi pengolahan produksi perikanan seperti pengeringan ikan, pengeringan rumput laut, dan pembuatan dodol rumput laut. Hal ini ditandai dengan adanya usaha peningkatan keterampilan penduduk dalam pemanfaatan potensi pesisir. Sebagian besar penduduk di Tanjung Laut Indah merupakan penduduk pendatang dan memiliki sikap yang relatif terbuka terhadap pengaruh dari luar.

Selain itu tingkat partisipasi masyarakat juga cukup baik yang ditandai dengan partisipasi penduduk dalam pembangunan misalnya pembangunan jalan dan tempat ibadah. Meskipun sebagian besar penduduk Berbas Pantai memiliki mata pencaharian sebagai karyawan kontrak di sektor industri, namun jumlah penduduk yang terkait dengan aktifitas pesisir juga cukup besar, seperti pedagang atau pengumpul ikan hasil tangkapan nelayan dan sebagai nelayan. Penduduk Lhoktuan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani dan buruh. Secara umum pola ekonomi masyarakat di Lok Tuan dipengaruhi oleh kedudukan kawasan Lok Tuan sebagai kawasan pelabuhan dan permukiman (nelayan) serta perdagangan dan jasa. Pola permukiman pada umumnya

adalah permukiman tepi pantai, dengan ciri rumah panggung di atas air. Penduduk Lok Tuan memiliki kebudayaan yang tetap dilestarikan yakni Pesta Laut.

2.2.4 Heterogenitas Etnis

Masyarakat Kota Bontang merupakan masyarakat majemuk yang terbentuk secara genealogis (perkawinan) dan teritorial (sama-sama menempati suatu daerah dalam mencari penghidupan) dari berbagai etnis nusantara mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan etnis lokal Kalimantan seperti Banjar, Kutai, Melayu dan Dayak. Selain masyarakat Kutai, Banjar dan Melayu yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat setempat, tercatat hampir 60-70% penduduk Kota Bontang adalah pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, (seperti etnis Bugis, Bone, dsb). Pada umumnya mereka tinggal di sepanjang pesisir pantai Kota Bontang dan hidup sebagai nelayan. Meskipun berbeda etnis dan kebudayaan, penduduk lokal dan para pendatang yang mencari pekerjaan berupaya untuk memelihara budaya kerukunan bersama.

Berbagai kelompok kerukunan atau paguyuban telah terbentuk dikalangan masyarakat. Kerukunan atau paguyuban tersebut selain untuk menjaga kekerabatan juga kelestarian budaya (Potret Lingkungan Hidup Kota Bontang, 2003). Dengan dibukanya Kota Bontang sebagai kawasan kota industri yang digerakan oleh industri PT Badak LNG dan PKT, menjadi faktor pendorong bagi para pendatang untuk masuk dalam wilayah ini dengan tujuan utama untuk mendapatkan pekerjaan. Pada umumnya para pendatang yang memiliki ketrampilan dan pendidikan yang cukup memadai akan memasuki sektor industri pengolahan migas yang memiliki kualifikasi relatif tinggi bagi karyawannya atau bekerja di sektor pemerintahan, sedangkan bagi para pendatang dengan keterbatasan pendidikan dan keterampilan akan memasuki sektor tersier seperti perdagangan, jasa atau sektor informal lainnya.

2.3. Budaya Politik Kota Bontang

Bicara mengenai partisipasi politik, salah satu hal yang mudah dilakukan oleh warga negara adalah pemberian suara pada saat pemilihan umum. Di Indonesia, pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum

memiliki perwakilan di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan, melaksanakan Pemilu, hingga menetapkan pemenang Pemilu. Bahkan jauh sebelum itu, KPU bertugas untuk meverifiaksi partai-partai yang dapat menjadi peserta pemilihan umum.

Pelaksanaan Pemilu tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi masyarakat, dalam hal ini KPU juga berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Salah satu upaya yang dilakukan KPU adalah dengan membentuk relawan demokrasi. Program pembentukan tim relawan demokrasi pertama kali dilaksanakan pada Pemilu 2014. Relawan demokrasi bertugas membantu KPU melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait dengan tahapan pemilu. Pada Pemilu serentak 2019 ini, KPU kembali melaksanakan program relawan demokrasi sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih.

Dalam kondisi politik pada saat pemilu serentak pada tahun 2019 Kota Bontang berjalan sesuai rencana. Masyarakat mengikuti arahan dan proses yang sudah diberlakukan oleh petugas. Dalam perannya masyarakat berpartisipasi untuk menyuarakan hak mereka dengan pemilu serentak 2019. Dalam kasus yang ada di Kota Bontang adalah untuk pemula masih belum mengerti untuk memilih dengan cara mencoblos. Pelajar dengan umur 17 -18 tahun masih belum bisa membedakan bagaimana cara memilih yang benar. Tetapi dalam pemilu 2019 ini masyarakat lebih banyak berpartisipasi daripada tahun sebelumnya.

Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak antara pemilu legislatif dan eksekutif, memiliki kerumitan tersendiri dengan banyaknya surat suara yang harus dicoblos. Relawan demokrasi yang dibentuk KPU melalui KPU Kabupaten/Kota, bertugas mensosialisasikan tahapan pemilu dan tata cara penggunaan hak suara serta tak lupa mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Keragaman latar belakang masyarakat, melandasi relawan demokrasi dibagi menjadi sebelas segmen, salah satunya adalah segmen keagamaan. Relawan demokrasi segmen keagamaan merupakan upaya KPU bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama, untuk mensosialisasikan pemilu dan mendorong partisipasi umat masing-masing agama dalam Pemilu 2019.

Budaya politik kaula (subjek), yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Melihat keadaan dan kondisi masyarakat di kota bontang setelah dilakukan penelitian, dan setelah dianalisis membuktikan bahwa tidak ditemukannya hubungan yang signifikan antara budaya politik lokal terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019, dimana masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat yang berbudaya politik partisipan masih dapat dipengaruhi (dimobilisasi) orang lain, sedangkan masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat yang berbudaya politik parokial justru lebih bersifat otonom (berdasarkan kesadaran diri sendiri) dan tidak dimobilisasi orang lain.

Dalam budaya politik kota bontang bisa dikatakan masyarakatnya berbeda-beda dalam hal isu politik. Karena bagaimanapun masyarakat berhak untuk memilih pemimpin yang lebih baik untuk masa berikutnya. Pemerintah disini merasa mendapatkan posisi yang nyaman dalam pemerintahan. Setelah menjadi penguasa pemerintah tidak memperlihatkan apa yang sudah mereka lakukan setelah menjabat. Kedekatan walikota dengan masyarakat memang sangat bagus menurut pandangan mata. Tetapi tidak semua yang dilakukan penguasa mendapatkan hal yang positif.dengan isu yang ada masyarakat mengikuti alur kegiatan yang dilakukan pemerintah. Walaupun masyarakat tahu ada yang menjadi isu kota bontang, tetapi masyarakat bersikap seolah itu tidak ada masalah. Kultur Patriarki dan Kemandirian Politik sangat menarik dan relevan sekali dengan kondisi politik Kota Bontang. Dengan kuota 30 persen untuk perempuan, akan mendorong pengambilan kebijakan yang berimbang dan keberpihakan pada rakyat. Karena pengambil

keputusan langsung diputuskan oleh perwakilan perempuan. Dan, dengan jumlah pemilih perempuan dan laki-laki yang berimbang seharusnya menjadi bargaining posisi yang baik untuk elektoral. Beberapa data yang telah diupload di media lokal maupun website KPU. Data Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bontang tahun 2015 menunjukkan angka pemilih perempuan dan laki-laki tidak memiliki perbedaan jauh. Laki-laki berjumlah 56.103 dan perempuan 51.581. Kendati demikian, angka pemilih perempuan di Kota Bontang cukup berimbang. Sudah bisa dipastikan pengaruh suara perempuan menjadi penentu kemenangan. Pengaruh dari kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota perempuan bisa menjadi indikator dari tingginya partisipasi politik perempuan di Kota Bontang. Sejalan dengan itu, kesadaran perempuan dalam berpolitik di Kota Bontang harus mampu ditingkatkan pada pemilu mendatang yang sebentar lagi digelar. Kekuatan politik perempuan di Kota Bontang harus dibuktikan dari kesadaran elektoral pemilih perempuan dalam pemilihan.